



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



# **RPJMN 2015-2019**

# **BIDANG POLITIK**

## **(DRAF AWAL)**

**Dr. Raden Siliwanti MPIA**  
**Direktur Politik dan Komunikasi**  
**BAPPENAS**

**Ciputat, 20 November 2014**

# KERANGKA PAPARAN

---

## **1. RPJPN 2005-2025 Bidang Pembangunan Politik**

- Visi-Misi Pembangunan Politik
- Tahapan dan Prioritas Pembangunan Politik
- Arah Pembangunan Politik

## **2. Trisakti, Nawa Cita, Agenda Strategis**

## **3. Quick Wins**

## **4. Kondisi Umum dan Tantangan Bidang Komunikasi**

## **6. Draft RPJMN 2015-2019 Bidang Politik**



---

# **1. RPJPN PEMBANGUNAN BIDANG POLITIK 2005-2025**



# MISI PEMBANGUNAN



Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila.



Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing.



Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum



Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu.



Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan



Mewujudkan Indonesia asri dan lestari

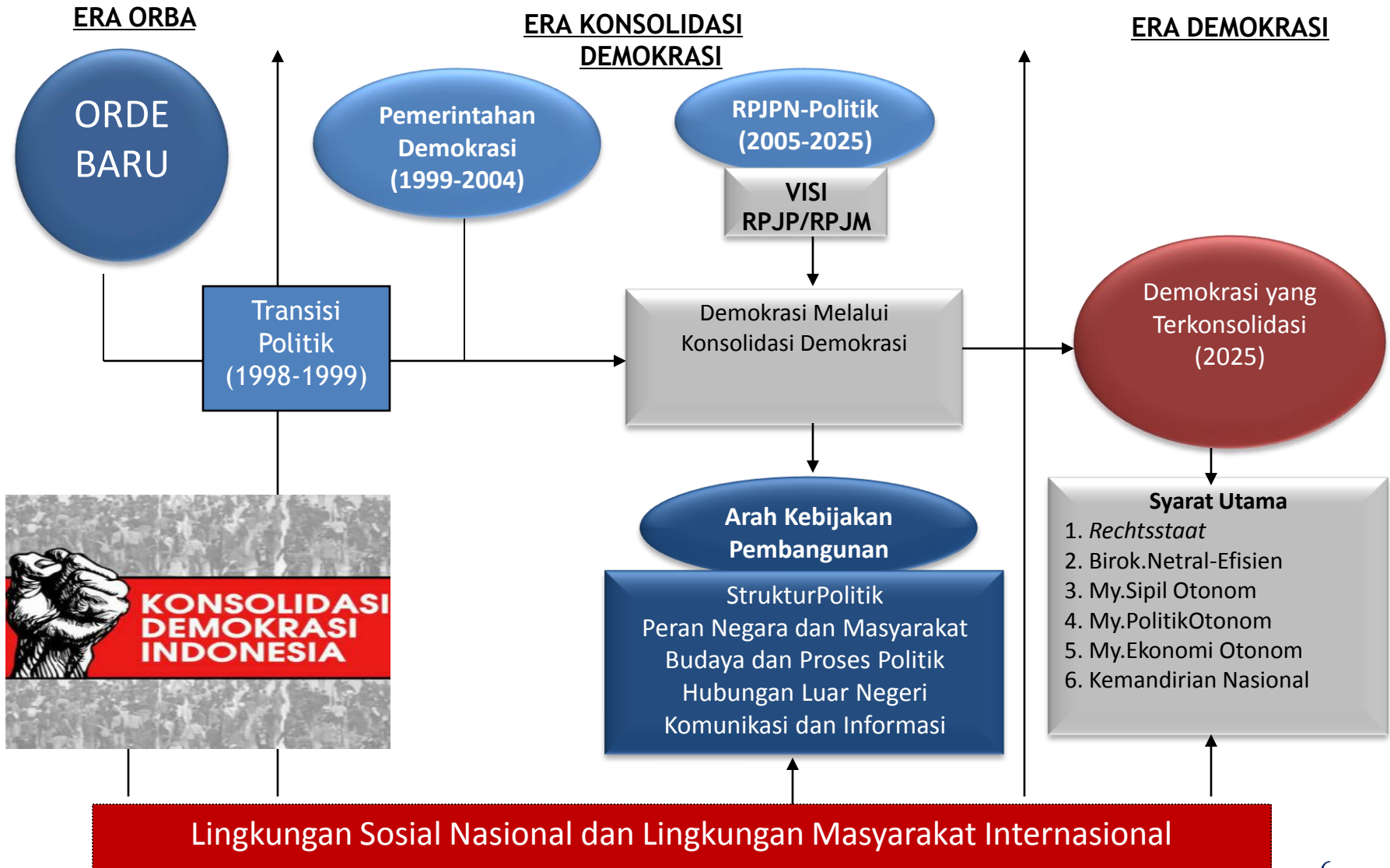


Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional



Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional

# VISI PEMBANGUNAN POLITIK 2005-2025



# MISI PEMBANGUNAN POLITIK

**Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum** adalah memantapkan kelembagaan demokrasi yang lebih kokoh; memperkuat peran masyarakat sipil; menjamin pengembangan media dan kebebasan media dalam mengomunikasikan kepentingan masyarakat

UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025

# TAHAPAN DAN PRIORITAS RPJPN 2005-2025 BIDANG POLITIK





# Arah Pembangunan Bidang Politik Dalam Negeri RPJPN 2005-2025





---

## **2. TRISAKTI, NAWA CITA, dan AGENDA STRATEGIS**

# Trisakti

## 1. Kedaulatan dalam politik

- Pembangunan demokrasi politik
- Kedaulatan rakyat menjadi karakter, nilai, dan semangat yang dibangun melalui gotong royong

## 2. Berdikari dalam ekonomi:

- Rakyat sebagai pemegang kedaulatan keuangan negara dan pelaku utama pembentukan produksi dan distribusi nasional
- Pemenuhan hak dasar rakyat

## 3. Kepribadian dalam kebudayaan

- Pembangunan karakter dan kegotongroyongan
- Kebhinekaan dan kemaritiman sebagai potensi bangsa untuk demokrasi politik dan demokrasi ekonomi





**JOKO WIDODO**  
**JUSUF KALLA**  
**2014**

**VISI, MISI DAN PROGRAM AKSI**

**JALAN PERUBAHAN**  
**UNTUK INDONESIA YANG BERDAULAT,**  
**MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN**

# VISI, MISI DAN PLATFORM PERUBAHAN

## AMANAT DALAM PEMBUKAAN UUD 1945:

1. MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN SELURUH TUMPAH DARAH
2. MEMAJUKAN KESEJAHTERAAN UMUM
3. MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA
4. IKUT MEMELIHARA KETERTIBAN DUNIA BERDASARKAN KEMERDEKAAN, Keadilan Sosial DAN PERDAMAIAN ABADI



MEROSOTNYA WIBAWA NEGARA

MELEMAHNYA SENDI-SENDI PEREKONOMIAN NASIONAL

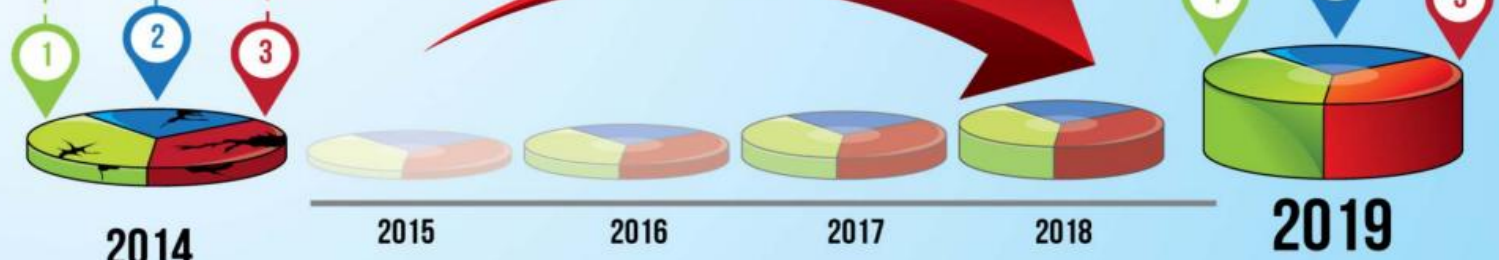
INTOLERANSI DAN KRISIS KEPERIBADIAN INDONESIA

KEMANDIRIAN YANG MENSEJAHTERAKAN

NEGARA BEKERJA

REVOLUSI MENTAL

### JALAN PERUBAHAN



## VISI

TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG ROYONG

## MISI

1. MEWUJUDKAN KEAMANAN NASIONAL YANG MAMPU MENJAGA KEDAULATAN WILAYAH, MENOPANG KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGAMANKAN SUMBERDAYA MARITIM, DAN MENCERMINKAN KEPERIBADIAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN.
2. MEWUJUDKAN MASYARAKAT MAJU, BERKESEIMBANGAN DAN DEMOKRATIS BERLANDASKAN NEGARA HUKUM.
3. MEWUJUDKAN POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF DAN MEMPERKUAT JATI DIRI SEBAGAI NEGARA MARITIM.
4. MEWUJUDKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA YANG TINGGI, MAJU DAN SEJAHTERA.
5. MEWUJUDKAN BANGSA YANG BERDAYA-SAING.
6. MEWUJUDKAN INDONESIA MENJADI NEGARA MARITIM YANG MANDIRI, MAJU, KUAT, DAN BERBASISKAN KEPENTINGAN NASIONAL
7. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKEPRIBADIAN DALAM KEBUDAYAAN.

# JALAN PERUBAHAN JOKOWI - JK UNTUK RAKYAT INDONESIA

## MENGHADIRKAN NEGARA YANG BEKERJA

1. RASA AMAN DAN MELINDUNGI
2. PEMBERANTASAN KORUPSI  
DAN PENEGAKAN HUKUM
3. PELAYANAN PUBLIK

## KEMANDIRIAN YANG MENSEJAHTERAKAN

1. DAULAT PANGAN BERBASIS  
AGRIBISNIS KERAKYATAN
2. DAULAT ENERGI BERBASIS  
KEPENTINGAN NASIONAL
3. RESTORASI EKONOMI  
MARITIM INDONESIA

## REVOLUSI MENTAL

1. EMANSIPASI
2. KEMANDIRIAN
3. KEBHINEKAAN

### KEMANDIRIAN YANG MENSEJAHTERAKAN

NEGARA  
BEKERJA

REVOLUSI  
MENTAL



VISI MISI JOKOWI JK

# NAWA CITA

**JOKOWI - JK**  
UNTUK RAKYAT INDONESIA

1. MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA NEGARA
2. MEMBUAT PEMERINTAH TIDAK ABSEN DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA
3. MEMBANGUN INDONESIA DARI PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH DAERAH DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN
4. MENOLAK NEGARA LEMAH DENGAN MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA
5. MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MANUSIA INDONESIA
6. MENINGKATKAN PRODUKTIVITAS RAKYAT DAN DAYA SAING DI PASAR INTERNASIONAL
7. MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI DENGAN MENGGERAKAN SEKTOR SEKTOR STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK
8. MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA
9. MEMPERTEGUH KE-BHINEKA-AN DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL INDONESIA



**1**

**KAMI AKAN MENGHADIRKAN KEMBALI NEGARA UNTUK MELINDUNGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGANEGARA.**

**NAWA CITA**  
**9 AGENDA PRIORITAS**

- **POLITIK LUAR NEGERI BEBAS-AKTIF**
- **MELINDUNGI HAK DAN KESELAMATAN WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI, KHUSUSNYA PEKERJA MIGRAN**
- **KEDAULATAN MARITIM**
- **MENINGKATKAN ANGGARAN PERTAHANAN 1,5 PERSEN DARI GDP DALAM 5 TAHUN KE DEPAN**
- **MENGEMBANGKAN INDUSTRI PERTAHANAN NASIONAL**
- **MENJAMIN RASA AMAN WARGANEGARA DENGAN MEMBANGUN POLRI YANG PROFESIONAL**



**VISI MISI JOKOWI JK**



2

**KAMI AKAN MEMBUAT PEMERINTAH SELALU HADIR DENGAN MEMBANGUN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DEMOKRATIS, DAN TERPERCAYA**

# **NAWA CITA**

## **9 AGENDA PRIORITAS**

- **MEMULIHKAN KEPERCAYAAN PUBLIK MELALUI REFORMASI SISTEM KEPARTAIAN, PEMILU DAN LEMBAGA PERWAKILAN**
- **MENINGKATKAN PERANAN DAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM POLITIK DAN PEMBANGUNAN**
- **MEMPERKUAT KANTOR KEPRESIDENAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS-TUGAS KEPRESIDENAN SECARA LEBIH EFEKTIF**
- **MEMBANGUN TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN**
- **MENJALANKAN REFORMASI BIROKRASI**
- **MEMBUKA PARTISIPASI PUBLIK**



**VISI MISI JOKOWI JK**

**3**

**KAMI AKAN MEMBANGUN INDONESIA DARI  
PINGGIRAN DENGAN MEMPERKUAT DAERAH-DAERAH  
DAN DESA DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN**

**NAWA CITA  
9 AGENDA PRIORITAS**

- **DESENTRALISASI ASIMETRIS**
- **PEMERATAAN PEMBANGUNAN ANTAR WILAYAH TERUTAMA  
DESA, KAWASAN TIMUR INDONESIA DAN KAWASAN  
PERBATASAN**
- **PENATAAN DAERAH OTONOM BARU UNTUK KESEJAHTERAAN  
RAKYAT**
- **IMPLEMENTASI UU DESA**



**VISI MISI JOKOWI JK**



4

**KAMI AKAN MEMPERKUAT KEHADIRAN NEGARA DALAM MELAKUKAN REFORMASI SISTEM DAN PENEGAKAN HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT DAN TERPERCAYA.**

- **MEMBANGUN POLITIK LEGISLASI YANG KUAT : PEMBERANTASAN KORUPSI, PENEGAKAN HAM, PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP & REFORMASI LEMBAGA PENEGAK HUKUM**
- **MEMPERKUAT KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**
- **MEMBERANTAS MAFIA PERADILAN**
- **PEMBERANTASAN TINDAKAN PENEBAANGAN LIAR, PERIKANAN LIAR DAN PENAMBANGAN LIAR**
- **PEMBERANTASAN NARKOBA DAN PSIKOTROPIKA**
- **PEMBERANTASAN TINDAK KEJAHATAN PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG**
- **MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM HAK KEPEMILIKAN TANAH**
- **MELINDUNGI ANAK, PEREMPUAN DAN KELOMPOK MASYARAKAT MARJINAL**
- **MENGHORMATI HAM DAN PENYELESAIAN SECARA BERKEADILAN TERHADAP KASUS-KASUS PELANGGARAN HAM PADA MASA LALU**
- **MEMBANGUN BUDAYA HUKUM**

# **NAWA CITA**

## **9 AGENDA PRIORITAS**



**VISI MISI JOKOWI JK**

5

KAMI AKAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP  
MANUSIA INDONESIA

## NAWA CITA 9 AGENDA PRIORITAS

- PROGRAM “**INDONESIA PINTAR**” MELALUI WAJIB BELAJAR 12 TAHUN BEBAS PUNGUTAN
- PROGRAM KARTU “ **INDONESIA SEHAT** ” MELALUI LAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT
- PROGRAM “**INDONESIA KERJA**” DAN “**INDONESIA SEJAHTERA**” MELALUI REFORMASI AGRARIA 9 JUTA HA UNTUK RAKYAT TANI DAN BURUH TANI, RUMAH SUSUN BERSUBSIDI DAN JAMINAN SOSIAL



VISI MISI JOKOWI JK



**7**

**KAMI AKAN MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN EKONOMI  
DENGAN MENGERAKKAN SEKTOR-SEKTOR  
STRATEGIS EKONOMI DOMESTIK**

**NAWA CITA  
9 AGENDA PRIORITAS**

- **MEMBANGUN KEDAULATAN PANGAN**
- **MEWUJUDKAN KEDAULATAN ENERGI**
- **MEWUJUDKAN KEDAULATAN KEUANGAN**
- **MENDIRIKAN BANK PETANI/NELAYAN DAN UMKM  
TERMASUK GUDANG DENGAN FASILITAS PENGOLAHAN  
PASKA PANEN DI TIAP SENTRA PRODUKSI TANI/ NELAYAN**
- **MEWUJUDKAN PENGUATAN TEKNOLOGI MELALUI KEBIJAKAN  
PENCIPTAAN SISTEM INOVASI NASIONAL**



**VISI MISI JOKOWI JK**



8

## KAMI AKAN MELAKUKAN REVOLUSI KARAKTER BANGSA

- **MEMBANGUN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**
- **MENGEVALUSI MODEL PENYERAGAMAN DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL**
- **JAMINAN HIDUP YANG MEMADAI BAGI PARA GURU TERUTAMA BAGI GURU YANG DITUGASKAN DI DAERAH TERPENCIL**
- **MEMPERBESAR AKSES WARGA MISKIN UNTUK MENDAPATKAN PENDIDIKAN TINGGI**
- **MEMPRIORITASKAN PEMBIAYAAN PENELITIAN YANG MENUNJANG IPTEK**

## NAWA CITA 9 AGENDA PRIORITAS



VISI MISI JOKOWI JK

9

**KAMI AKAN MEMPERTEGUH KE-BHINNEKA-AN  
DAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL  
INDONESIA**

**NAWA CITA**  
**9 AGENDA PRIORITAS**

- **MEMPERKUAT PENDIDIKAN KE-BHINNEKA-AN DAN MENCIPTAKAN RUANG-RUANG DIALOG ANTAR WARGA**
- **RESTORASI SOSIAL UNTUK MENGEMBALIKAN RUH KERUKUNAN ANTAR WARGA**
- **MEMBANGUN KEMBALI GOTONG ROYONG SEBAGAI MODAL SOSIAL MELALUI REKONSTRUKSI SOSIAL**
- **MENGEMBANGKAN INSENTIF KHUSUS UNTUK MEMPERKENALKAN DAN MENGANGKAT KEBUDAYAAN LOKAL**
- **MENINGKATKAN PROSES PERTUKARAN BUDAYA UNTUK MEMBANGUN KEMAJEMUKAN SEBAGAI KEKUATAN BUDAYA**



VISI MISI JOKOWI JK



# Reformasi sistem dan kelembagaan demokrasi

- Restorasi UU partai politik
- Pengaturan pembiayaan partai politik
- Inisiasi reformasi pengaturan pembiayaan kampanye
- Reformasi pengaturan pengawasan penyelenggaraan pemilu
- Memperjuangkan penciptaan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan
- Komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih



# Tata Kelola Pemerintahan

Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan prioritas:

- Memulihkan kepercayaan publik pada institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu dan lembaga perwakilan;
- Peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi pemerintah
- Mewajibkan instansi pemerintah membuat laporan kinerja dan membuka akses informasi publik sesuai UU 14/2008
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik.
- Menjamin hak WN untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik dan proses pengambilan keputusan
- Menata kembali pemilikan frekuensi penyiaran
- Mendorong inovasi dan pengembangan industry telekomunikasi
- Reformasi Birokrasi dan perbaikan kualitas Pelayanan Publik:
- Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi
- Pemberantasan korupsi di lingkungan aparat sipil Negara
- Membuka ruang partisipasi publik melalui citizen charter dalam UU kontrak layanan publik.
- Menjalankan secara konsisten UU ASN
- Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan pemerintah pusat yang berada dibawah presiden maupun kelembagaan pemerintah daerah melalui revisi UU Pemerintahan Daerah

## MEMBANGUN KETERBUKAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- Menjalankan secara konsisten UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
- Mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU No 14/2008 untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu: yang transparan, efektif, dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik dengan meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik
- Menjamin hak negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik
- Penataan kembali frekuensi penyiaran sehingga tidak terjadi monopoli atau penguasaan oleh kartel industri penyiaran
- Mendorong inovasi dan pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi, mampu menciptakan dan memproduksi teknologi informasi dan komunikasi serta menjadi tuan rumah di negara sendiri

1. Membangun untuk manusia dan masyarakat
2. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pembangunan ekologi yang berkelanjutan
3. Memulihkan dan menjaga keseimbangan antarsektor, antarwilayah dan antarkelas sosial dalam pembangunan
4. Mewujudkan perekonomian yang inklusif, berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, dan keunggulan SDM

## **Titik Tekan Pembangunan Kabinet Trisakti Jokowi-JK**

**27**

# PROGRAM PEMBANGUNAN REVOLUSI MENTAL

## PERMASALAHAN :

- ✓ Untuk menjadi bangsa yang mandiri dan mampu bersaing, Indonesia harus memiliki manusia manusia unggul.
- ✓ Unggul itu tidak bisa didapat hanya dengan melahirkan manusia sehat dan cerdas, tetapi yang unggul mentalnya.
- ✓ Dalam hal menghasilkan manusia manusia yang bermental unggul ini, Indonesia harus memiliki program khusus untuk kurang lebih satu decade kedepan

## PROGRAM QUICK WINS

# PROGRAM PEMBANGUNAN REVOLUSI MENTAL

## Kampanye Publik

- Melalui dukungan lembaga penyiaran sebagai pengguna frekuensi publik
- Penayangan film/video bertema revolusi mental di ruang publik bagi 1.200 kecamatan
- Tersusunnya model/percontohan ruang-ruang publik terbuka terkait dengan revolusi mental

## **Program cita caraka (bandwith untuk rakyat)**

- Pembangunan jaringan komunikasi data super backbone
- Penetapan arsitektur e Gov nasional
- Layanan e gov terintegrasi untuk 10% kab/kota dengan index gov mencapai 3.4 (skala 4)
- Penerapan NCIO (?)
- Desain satelit multifungsi
- Dukungan TIK untuk percontohan proyek rusunawa dan pelabuhan di Kuala Tanjung dan Bitung
- Dukungan TIK untuk desa: nelayan dan pertanian

## **PROGRAM QUICK WINS**

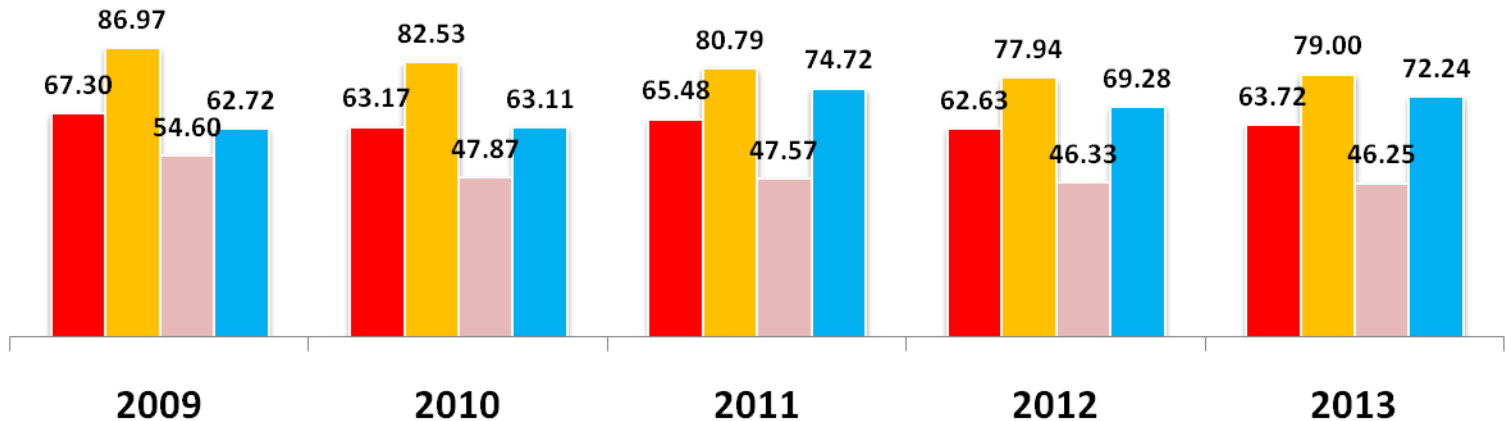
**30**

# **3. KONDISI UMUM DAN TANTANGAN BIDANG KOMUNIKASI**

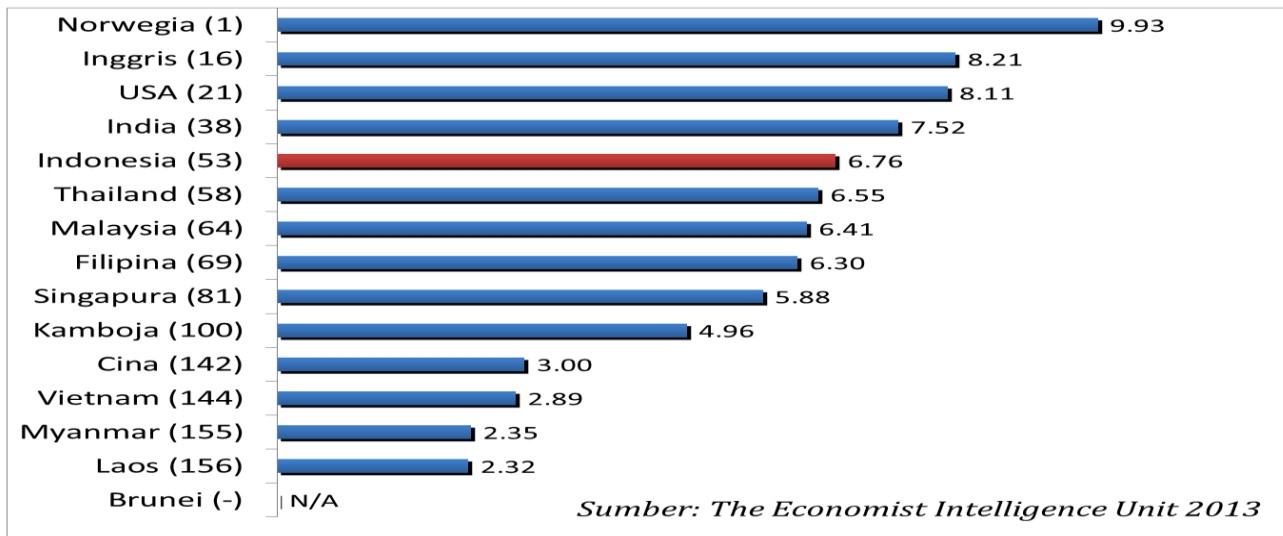
# Indeks Demokrasi Indonesia

■ Indeks Demokrasi Indonesia ■ Kebebasan Sipil ■ Hak-Hak Politik ■ Kinerja Lembaga

## Indeks Demokrasi Indonesia

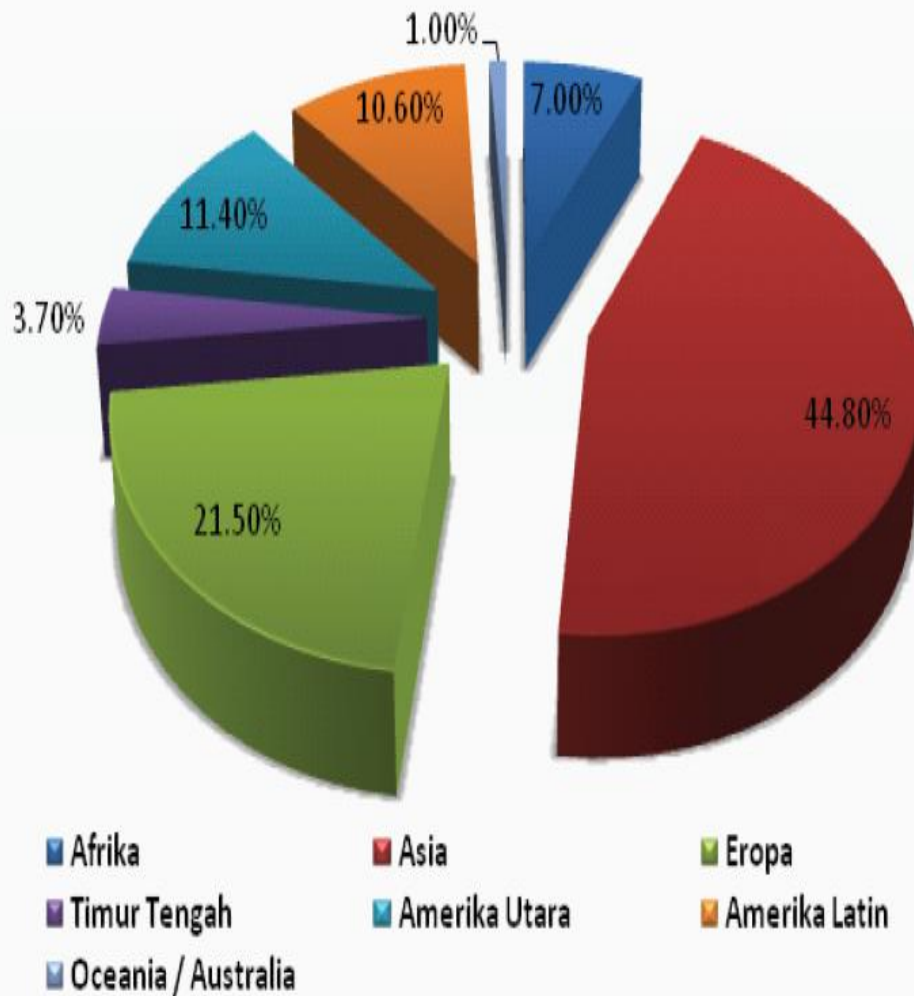


## Indeks Demokrasi Dunia 2012





# Pengguna Internet Dunia



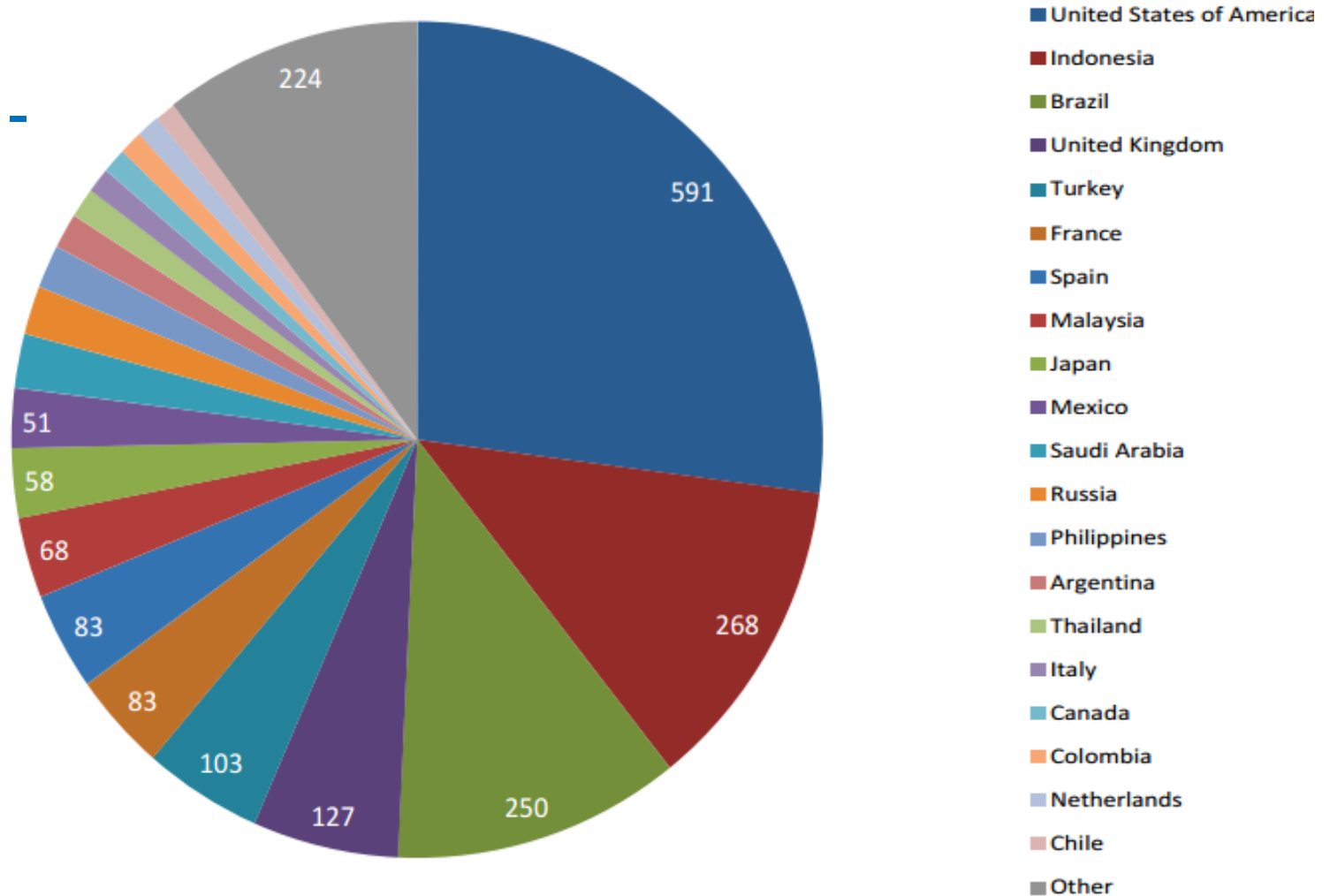
- Tahun 2012 Indonesia peringkat ke 4 di Asia sebanyak 55 Juta (penetrasi 22.4%)
- Pengguna Internet Dunia TA 2012 mencapai 2.4 Milyar (34.3%)
- Cina pengguna internet terbesar di ASIA sebanyak 513 juta (penetrasi 38.4% dari 1.4 Milyar penduduknya)
- Lonjakan pengguna Internet Dunia sebesar 566, 4 %
- Lonjakan pengguna internet di Afrika sebesar 3606 % (lonjakan terbesar)

# Pengguna Internet Dunia (1)

MEDIA SOSIAL : Twitter



2 Miliar  
Tweets -  
2013

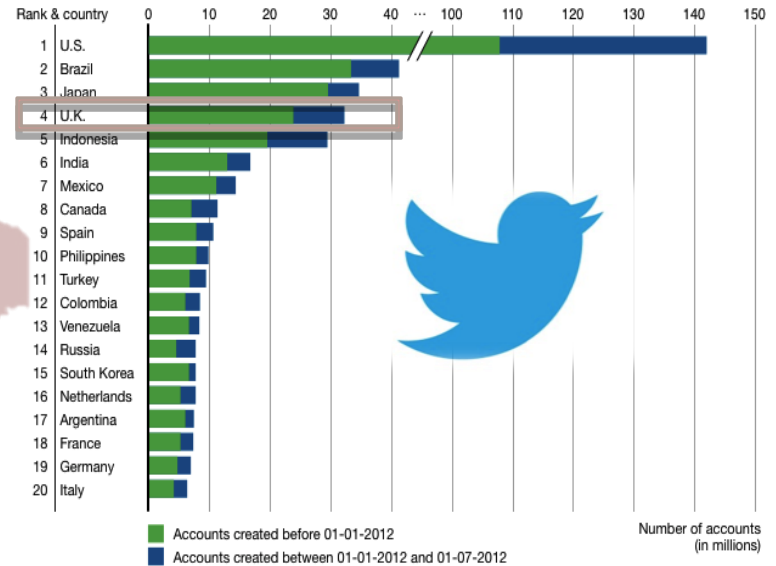
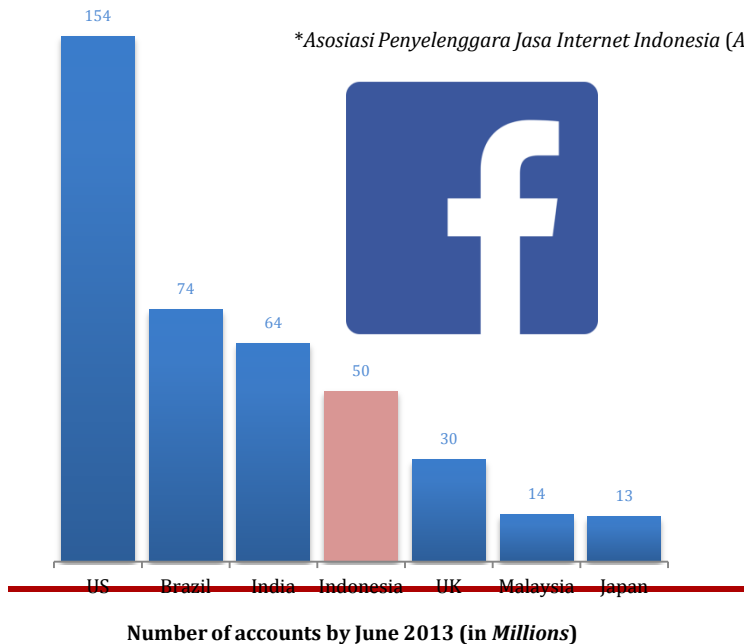


# Tantangan Pergeseran media komunitas/tradisional ke pemanfaatan media sosial

Over 238 million of Indonesian; **there are 63 million internet users on 2013**, and predicted will grow to 139 million\* in 2015.

Most internet users, dominated by the **age group of 15-35 year-old**, mainly utilizing it for **social activity purposes** (music, games, email, browsing, entertainment)

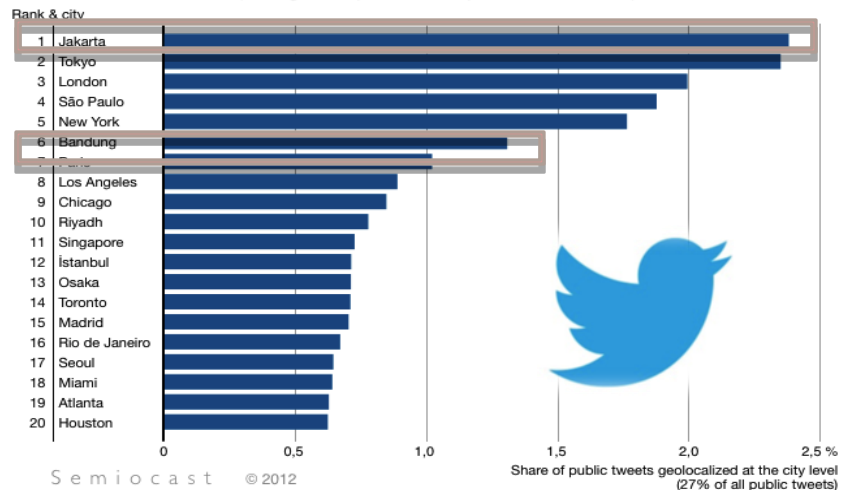
\*Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)



SemioCast © 2012

## Top 20 cities by number of posted tweets

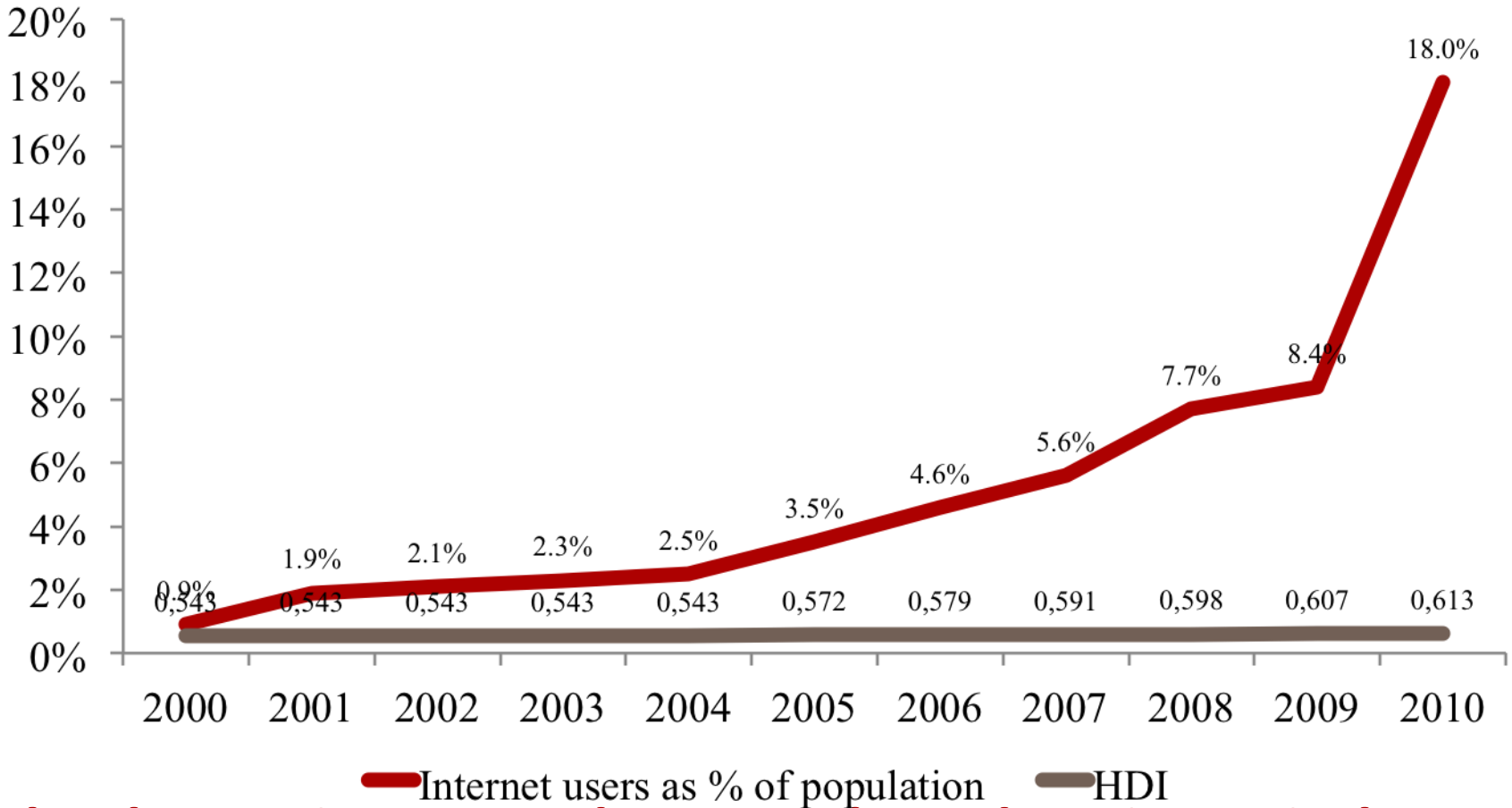
(among 10.6B public tweets posted in June 2012)



SemioCast © 2012

PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL SEBAGAI HIBURAN (SAJA)

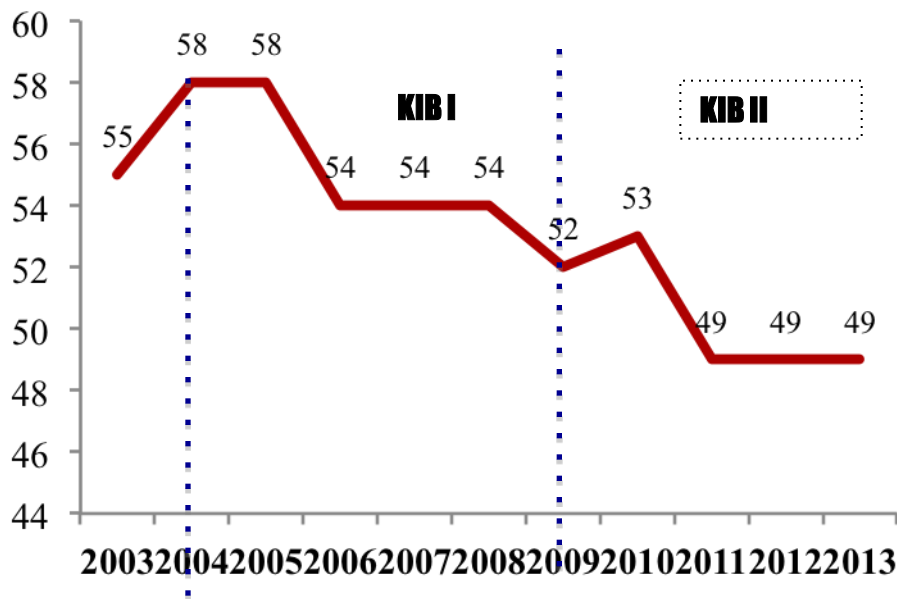
# Internet users vs HDI



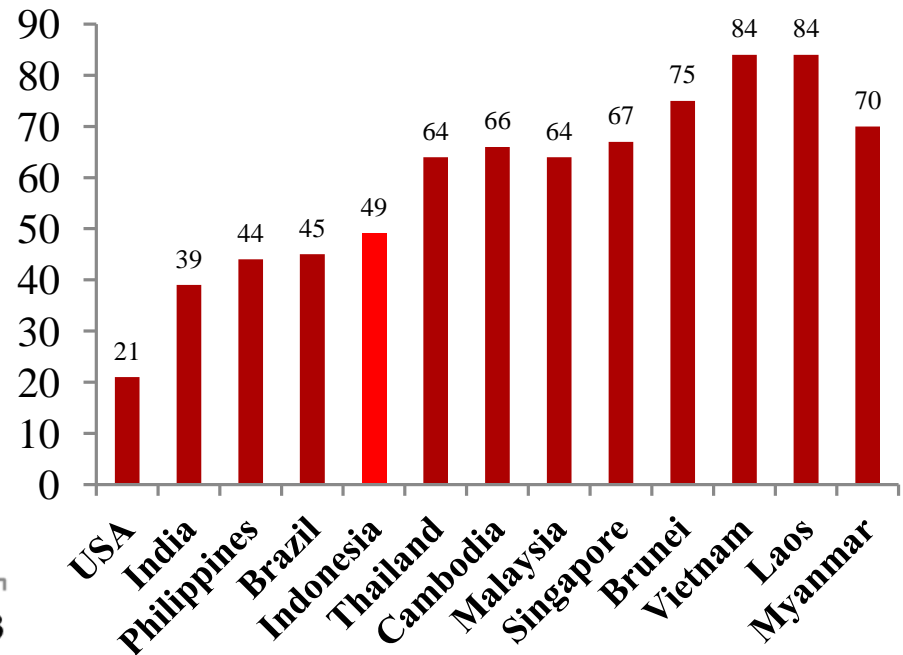
**Perkembangan internet pada masyarakat Indonesia meningkat pesat namun indeks HDI masih rendah**

# Kebebasan Pers di Indonesia

## Kebebasan Pers Indonesia

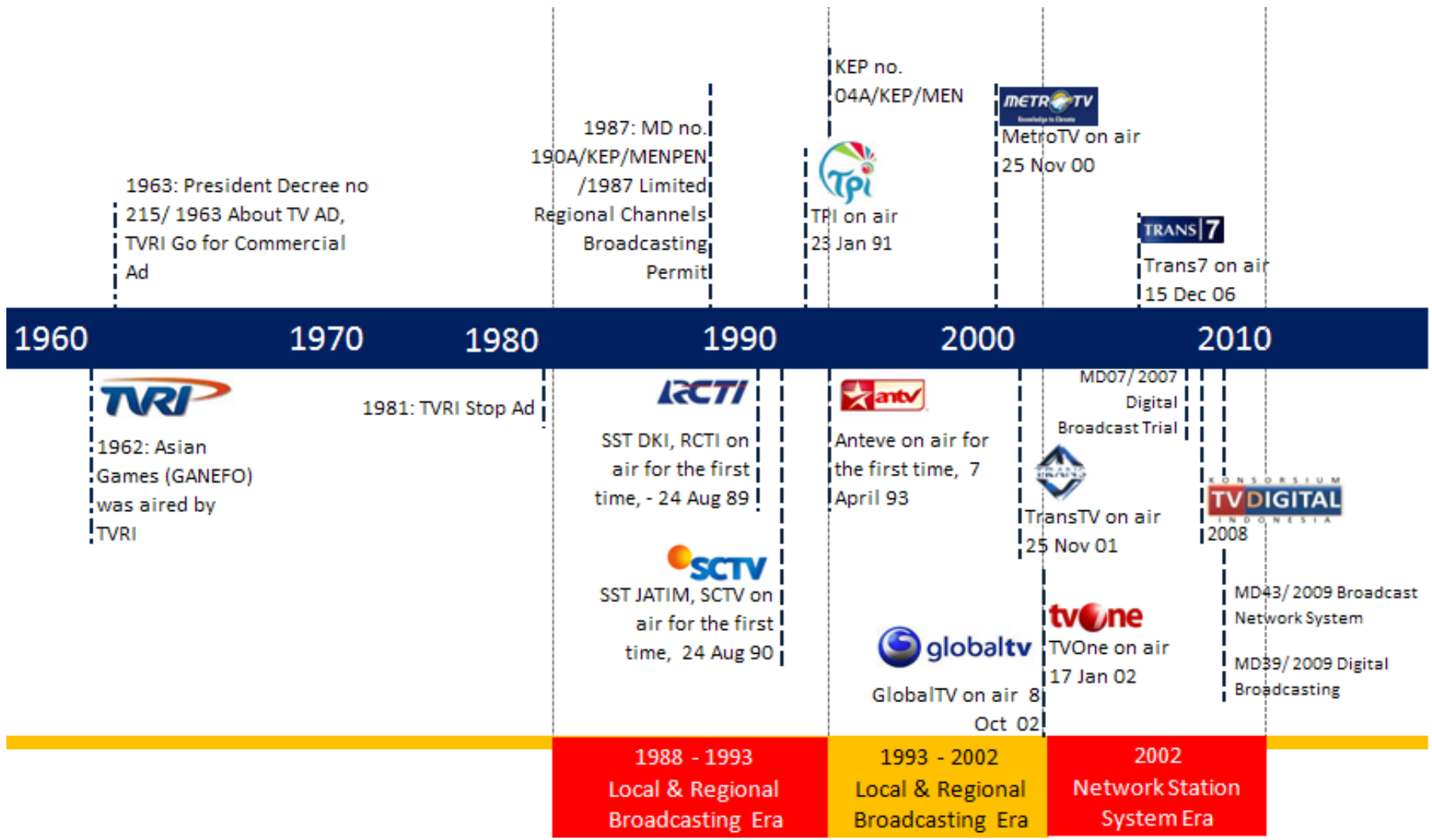


## Skor Kebebasan Pers 2013



Ruang kebebasan pers yang sangat besar perlu diimbangi dengan kebijakan untuk memperbanyak akses dan pilihan sumber informasi → literasi media bagi masyarakat penting

# Perkembangan Jumlah Lembaga Penyiaran



# Grup Media Penyiaran di Indonesia

- Konsolidasi Media TV tahun 2004 membentuk cluster grup: MNC, Trans media, Emtek, Viva, Metro



- Penetrasi TV mencapai 92% (paling tinggi dibandingkan media-media lainnya)
- Melihat penetrasi yang besar itu TV harus dapat dimanfaatkan dengan baik
- Siaran TV tidak lepas dari ideologi ekonomi dan politis
- Tantangan selanjutnya setelah revitalisasi TV → TV ONLINE (bentuk baru) \* Prediksi

- **TVRI merupakan TV satu-satunya selama 25 tahun (LPP berdiri th 1962, LPS muncul thn 1987) → RCTI**
- **TVRI memiliki jumlah stasiun terbanyak (376) namun sebagian kondisi peralatan pemancar tidak optimal → gambar tidak bagus, tidak siaran**
- **TVRI memegang peranan sebagai bentuk penyeimbang dari siaran TV swasta, menjaga kedaulatan dan pemersatu bangsa**
- **TVRI bukan sebagai TV referensi seperti TV BBC, ABC, CBS dll,**
- **Program TVRI tidak masuk dalam rating Nielsen (rating program yang sering ditonton), TVRI kalah bersaing dengan LPS dan bukan sebagai TV Referensi bagi pengguna tv di Indonesia**
- **Revitalisasi TVRI sebagai SOLUSI**
- **Revitalisasi TVRI membutuhkan perubahan kebijakan, investasi modal besar baik infrastruktur, manajemen, content (program) → (dikelola secara kreatif o/profesional untuk menciptakan program yang bagus, mendidik)**

# KONGLOMERASI MEDIA DI INDONESIA

## 12 PENGUASA MEDIA DI INDONESIA

| KELOMPOK                 | TV | RADIO | MEDIA CETAK | MEDIA ONLINE | PEMILIK                            |
|--------------------------|----|-------|-------------|--------------|------------------------------------|
| ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI  | 3  | -     | -           | 1            | KELUARGA SARIATMADJA               |
| MRA MEDIA                | -  | 11    | 16          | -            | ADIGUNA SOETOWO, SOETIKNO SOEDARJO |
| FEMINA GROUP             | -  | 2     | 14          | -            | PIA ALISJAHBANA                    |
| TEMPO INTI MEDIA         | 1  | -     | 3           | 1            | YAYASAN TEMPO                      |
| BERITASATU MEDIA HOLDING | 2  | -     | 10          | 1            | LIPPO GROUP                        |

Media Swasta LAINNYA

- 3 National TV
- 3 Other TV Net

Media Swasta LAINNYA

- ANTV
- Tvone
- Online
- 2 National TV
- Other TV Net
- 1 Radio
- Elshinta Mag

- 2 National TV
- 1 Online

TRAI  
MED

- 1 National TV
- 3 Print

MEDIA  
Group

- 1 radio
- > 30 JPCM NET
- > 15 Tabloid
- > 5 Magz
- > 130 Newspaper

JAW  
PO

- > 15 Radio
- > 20 Print

- > 15 Print

- 1 National TV w
- > 90 Print
- 4 Radio & Jaringannya (6)

Media Swasta LAINNYA

Media Swasta LAINNYA

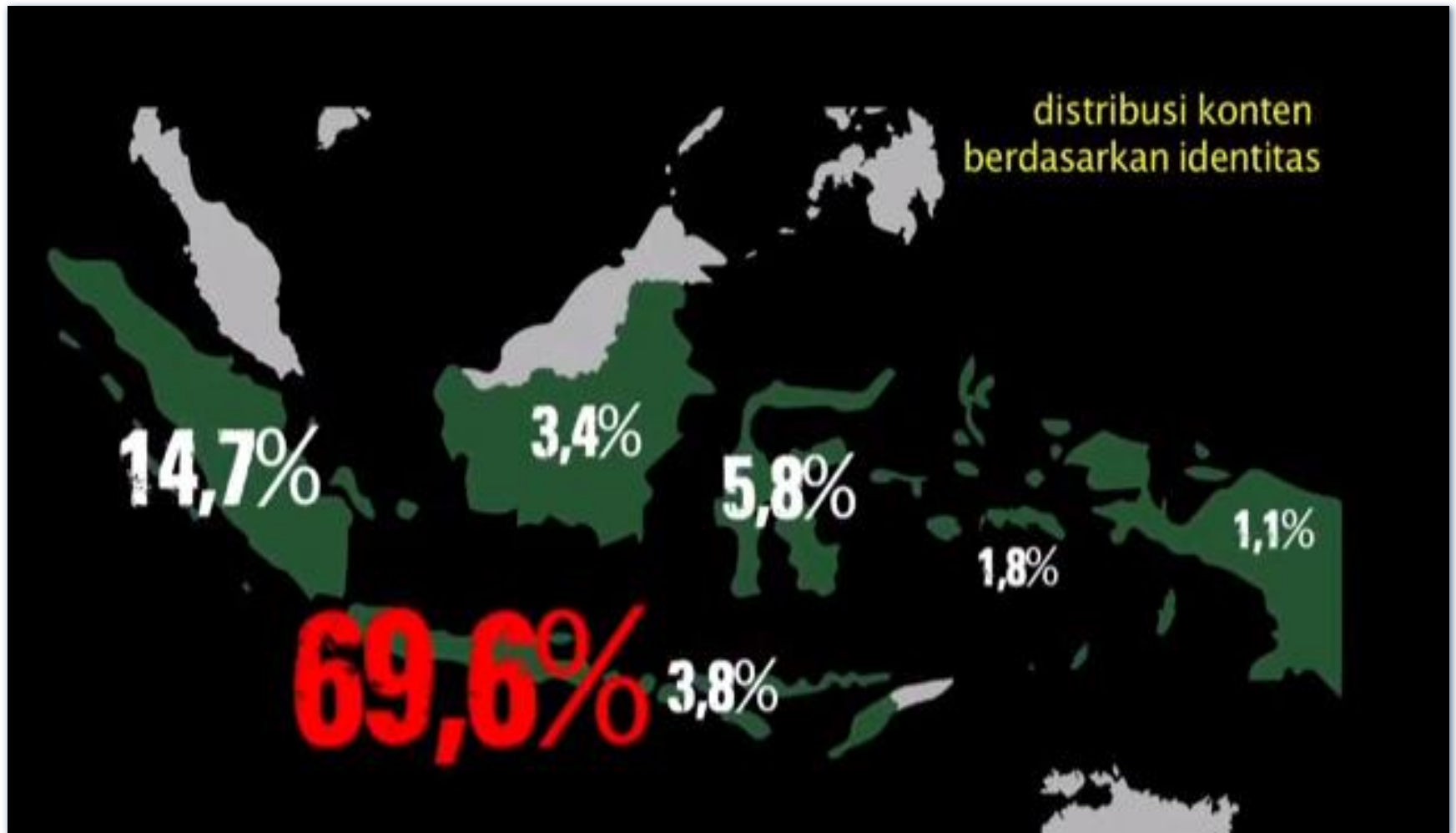
Media Swasta LAINNYA



# Tantangan Lembaga Penyiaran Publik/Swasta

- LPP/LPS masih terbatas dalam memberikan konten penyiaran informatif dan mencerdaskan bangsa → belum “SOS”
-

# Tantangan Penyebaran Informasi Publik



## Sisi Pemerintah

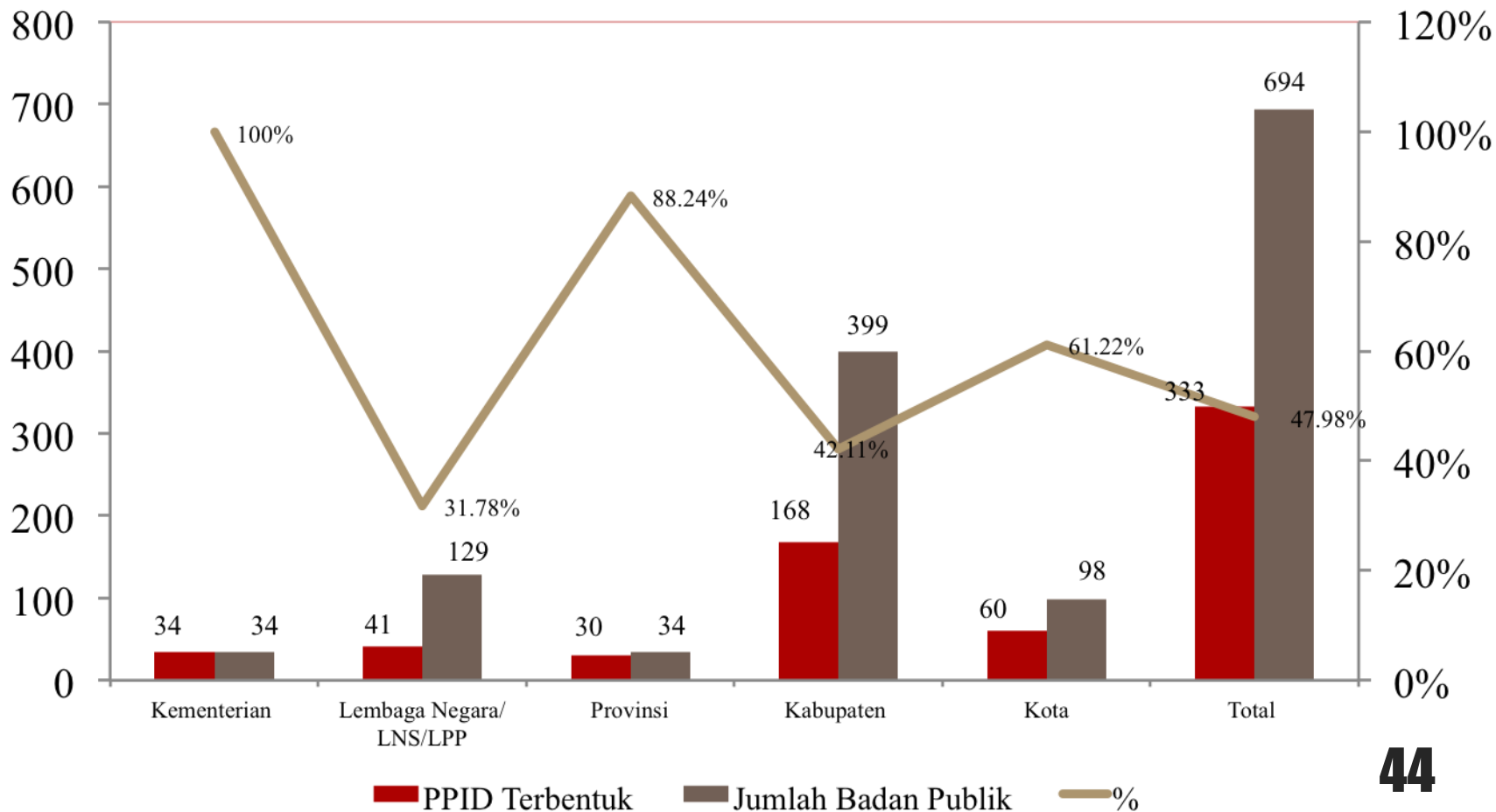
- Konsensus demokrasi?
- Masih rendahnya komitmen pejabat publik untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik.
- Keterbukaan dianggap sebagai beban bukan modalitas untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat
- Keterbatasan kapasitas SDM bidang komunikasi dan informasi

## Sisi Masyarakat

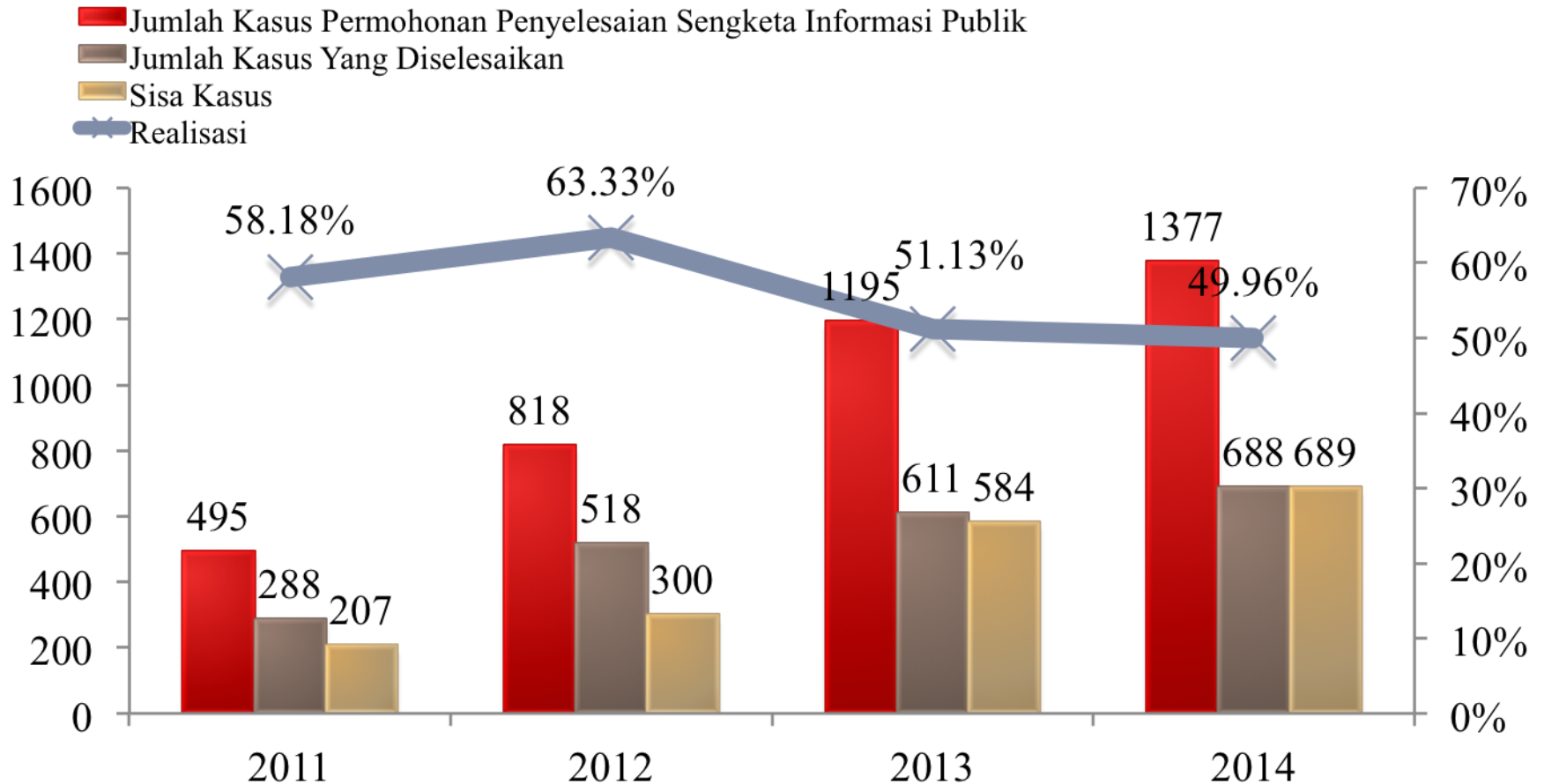
- Kesadaran demokrasi masih rendah (partisipasi publik rendah)
- Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dan kebutuhan akan informasi

# Pembentukan PPID

## Juli 2014

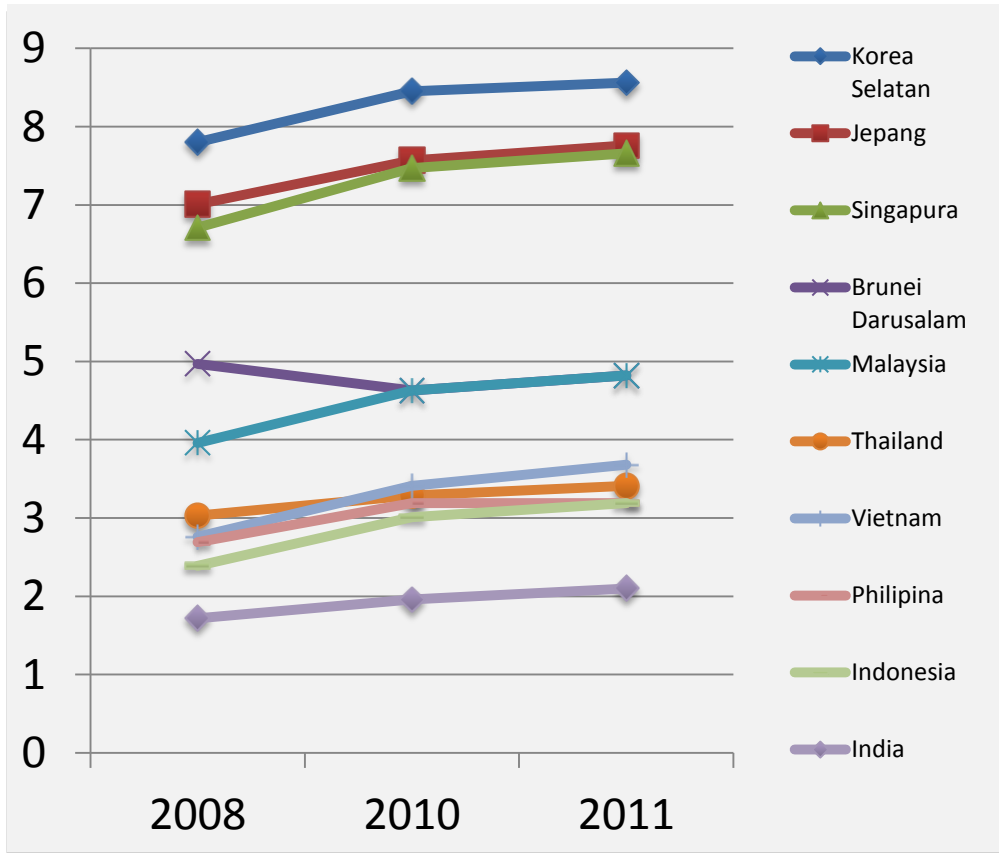


# Sengketa Informasi Publik



- Terus bertambahnya jumlah kasus/sengketa informasi
- Masyarakat makin sadar informasi vs Kesiapan Pemerintah (badan publik)

# Perkembangan Masyarakat Informasi



Sumber : ITU, Measuring the Information Society 2012; Buku Putih Kemkominfo 2012

Keterbatasan karena faktor geografi dapat dilengkapi dengan kemajuan teknologi dan pemanfaatan/ penggunaan informasi (konten)

Globalisasi melalui teknologi informasi memberikan ancaman dan peluang. Dibandingkan dengan negara ASEAN, Indonesia lebih rendah dari Vietnam.

- ✓ **Indonesia belum memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi** untuk pengembangan diri, kemajuan dan kemakmuran.
- ✓ **Informasi tidak merata ke seluruh pelosok Indonesia**

**Masyarakat informasi** : masyarakat yang memiliki akses kepada infrastruktur, pemanfaatan konten, dan memiliki SDM pengelola informasi.

# Penguatan KIP, KPI, dan Dewan Pers

- Peran Komisi Informasi untuk mendorong partisipasi aktif rakyat dan pengawasan; mendorong badan publik untuk melayani kebutuhan informasi masyarakat; mengeliminasi kesenjangan informasi
- Prinsip demokratisasi penyiaran yang mensyaratkan terlaksananya keragaman kepemilikan dan keragaman isi, merupakan ruh dari Undang-Undang Penyiaran
- Kondisi saat ini KPI sebagai pengawas siaran program saja (sanksi program tidak tegas)
- Revisi UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002 belum selesai (*deadlock*)
- Dewan Pers harus mengawal penerapan etika media/pers dalam menyampaikan informasi kpd masyarakat

# **6. RPJMN 2015-2019**

## **(Draf Awal)**



# SASARAN UTAMA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI

**Terwujudnya proses positif konsolidasi demokrasi yang diukur dengan pencapaian angka indeks demokrasi Indonesia sebesar 75 pada tahun 2019, tingkat partisipasi politik rakyat sebesar 80, dan terselenggaranya pemilu yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2019**



- Menguatnya kelembagaan demokrasi dengan capaian indeks aspek institusi demokrasi sebesar 71 pada tahun 2019, dan terselenggaranya pemilu serentak tahun 2019 yang aman, damai, adil jujur dan demokratis;
- Terjaminnya kebebasan sipil dan terpenuhinya hak-hak politik rakyat dengan capaian IDI aspek kebebasan sipil sebesar 87, dan hak-hak politik sebesar 68 pada tahun 2019.
- Menguatnya peran lembaga perwakilan
- Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam kepengurusan parpol hingga 30%
- Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik
- Terjaganya stabilitas sosial dan politik yang ditandai dengan berkurangnya jumlah konflik kekerasan di masyarakat secara berkelanjutan sampai dengan tahun 2019

Sasaran RPJMN 2015 - 2019: Terwujudnya keterbukaan informasi publik dan meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi publik dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan publik

## 1. Melaksanakan secara konsisten UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik melalui kegiatan:

- (a) Penataan regulasi yang mengatur kewajiban instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
- (b) Pengelolaan dan pelayanan informasi secara berkualitas oleh instansi pemerintah pusat dan daerah;
- (c) Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya;
- (d) Kampanye publik terkait revolusi mental
- (e) Penyebaran informasi publik secara berkualitas melalui berbagai media center, media komunitas dan media tradisional;
- (f) Pembentukan PPID di setiap badan publik, terutama di daerah dan lembaga non pemerintah yang operasional sesuai dengan UU KIP serta peraturan pelaksanaannya;
- (g) Penyediaan informasi yang terkait dengan rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
- (h) Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi.
- (i) Penguatan *Government Public Relation* (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat.
- (j) Penguatan KIP dan Dewan Pers

## **2. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, dengan strategi sebagai berikut:**

- (a)** Penguatan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
- (b)** Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
- (c)** Pemanfaatan media sosial untuk peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam interaksi pemerintah dan masyarakat;
- (d)** Penyediaan dan pelembagaan forum konsultasi publik dan ruang partisipasi lainnya untuk masyarakat sipil oleh seluruh badan publik;

3. Meningkatkan kualitas penyiaran melalui strategi:
- (a) revisi terhadap UU tentang Penyiaran;
  - (b) pembentukan pemeringkatan untuk menilai kualitas penyiaran publik;
  - (c) penguatan peran Komisi Penyiaran Indonesia.



---

# Terima Kasih